

BAB II

MILITER DAN DINAMIKA POLITIK MESIR

Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara. Keberadaan Mesir memiliki arti penting bagi dunia internasional, karena kebudayaan Mesir menjadi tolok ukur perkembangan kebudayaan di dunia. Keberuntungan itu semua tidak terlepas dari wilayah Mesir yang merupakan gerbang penghubung tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Sehingga stabilitas keamanan di Mesir perlu dijaga demi terciptanya ekonomi kawasan Timur Tengah dan dunia yang stabil.

Bab ini akan menjelaskan tentang Militer Mesir beserta dinamika politik Mesir sebelum dan sesudah revolusi yang terjadi pada tahun 2011. Batasan waktu pembahasan dalam bab ini ialah kondisi Mesir di bawah pemerintahan Husni Mubarak (1981-2011). Fokus pembahasan bab ini meliputi beberapa hal, antara lain gambaran umum tentang Militer Mesir, sistem pemerintahan Mesir, Mesir pada masa rezim Husni Mubarak, serta fenomena Arab Spring yaitu revolusi Melati dan Mesir 2011.

A. Militer di Mesir

Tentara Mesir mengambil alih kekuasaan pada bulan Juli 1952 dalam sebuah kudeta yang didukung AS untuk menggulingkan boneka Inggris Raja Farooq. Proyek CIA ini dijabarkan oleh Miles Copeland, seorang agen CIA, pada tahun 1970 dalam bukunya *'The Game of Nations'*, kemudian juga dijelaskan dalam memoarnya tersebut pada tahun 1989 sebagian besar perwira militer junior "The Game Player" membuat sebuah gerakan yang berisi para perwira militer (The Free Officers Movement) membentuk sistem politik baru yang ternyata di kemudian hari menjadi institusi yang paling terorganisir dan penting di Mesir

Pada tahun 1956 Gamal Abdul Nasser mengambil peran presiden Mesir. Nasser menasionalisasi Terusan Suez, yang menyebabkan perang dengan Inggris, Prancis, dan Israel dan berkat peristiwa tersebut Presiden Nasser diberi gelar pahlawan nasional dan meningkatkan "personal grade" nya di dunia Arab.

Kerugian kepada Israel dalam perang enam hari tahun 1967 menyebabkan pimpinan militer mengambil keputusan untuk menjauh dari pemerintahan. Sehingga kekuasaan pemerintahan diberikan kepemimpinannya kepada rakyat sipil, sementara dalam menjaga kebijakan luar negeri, pertahanan dan anggaran nasional secara kuat masih dibawah kendalinya. Sampai saat ini, peluang untuk menjadi jajaran tentara senior di militer hanya dapat diperoleh setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam mengenai kecenderungan politik serta pandangannya tentang Islam dari seorang calon perwira.

Saat ini, kekuatan militer Mesir adalah yang terbesar di Afrika dan Timur Tengah, dan tentara terbesar ke-10 di dunia. Sebuah organisasi bernama *The National Services Projects Organization and the Egyptian Organization for Industrial Development* mendominasi perekonomian Mesir melalui berbagai perusahaan korporasi dengan perusahaan manufaktur baik skala domestik hingga internasional untuk para tentara. Militer terlibat dalam sektor industri dan jasa, termasuk senjata, elektronik, produk konsumen, pembangunan infrastruktur, agribisnis, penerbangan, pariwisata dan keamanan. Demikian pula sebagian besar Gubernur daerah Mesir adalah pensiunan perwira tentara. Banyak institusi sipil yang strategis dan perusahaan sektor publik dijalankan oleh mantan jenderal. Tiga sektor pendapatan utama negara (pertanian, perkotaan dan pariwisata) dipimpin oleh mantan perwira militer. Tentara sangat terlibat dalam perekonomian nasional. Menurut beberapa perkiraan sebanyak 40% dari perekonomian Mesir dikendalikan oleh militer. Kemudian, salah satu wilayah yang menjadi jalur perdagangan

internasional yaitu jalur terusan Suez merupakan wilayah yang sangat rentan akan pembajakan dan kriminal, sehingga militer juga menjaga kestabilan keamanan disana.



Gambar 2 1 Timur Tengah sebagai Penghubung Eropa-Asia-Afrika
Sumber : Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*,
hal 9.

Militer Mesir telah memainkan peran sentral dalam melindungi kepentingan AS di wilayah tersebut. Sejak kudeta militer pada tahun 1952, AS telah mengucurkan dana untuk militer Mesir dengan bantuan lebih dari 30 miliar dolar. Bantuan AS ini adalah bentuk suap untuk menjaga keseimbangan regional bagi kepentingan AS. Kepala pertahanan Mesir saat ini, Abdel Fattah al-Sisi, adalah alumni *US Army War College* di Pennsylvania, sedangkan kepala angkatan udara Mesir, Reda Mahmoud Hafez Mohamed, melakukan tur di Amerika Serikat sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*). Lebih dari 500 pelatih perwira militer Mesir adalah lulusan sekolah militer Amerika ini terjadi setiap tahun. Bahkan ada *Guest House* di barat laut Washington DC, dimana yang menempatinnya adalah pejabat militer Mesir yang tinggal ketika berada di ibukota Amerika.

Peran militer di Mesir telah memastikan tidak ada lembaga saingan lainnya pernah bisa berkembang. Akibatnya, sebagian besar lembaga negara terjadi korupsi yang kronis dengan disproporsionalitas ekonomi di tangan segelintir orang. Sementara itu personil militer direkrut dari desa-desa dan kota-kota di seluruh negeri hanya berjumlah sembilan posisi bintangara. Konsekuensinya, untuk mencapai posisi senior di militer Mesir harus mengikuti sistem yang dibuat sesuai kepentingan Amerika. Desain "pembinaan dan rekrutmen" ini membantu pimpinan militer Mesir mempertahankan loyalitas dalam jajaran militer, yaitu loyalitas kepada Amerika.

B. Sistem Pemerintahan Mesir

Sistem Pemerintahan Mesir adalah republik dan presiden sebagai kepala Negara. Berdasarkan Piagam Nasional 1962 dan Konstitusi 1971, Mesir merupakan sebuah Negara sosialis demokratis yang disebut Republik Arab Mesir. Dalam Piagam Nasional 1962 dikatakan bahwa tujuan Republik Mesir adalah kemerdekaan, sosialisme, dan kesatuan Arab, sedangkan konstitusi menetapkan struktur resmi dalam pemerintahan Mesir yakni, presiden, cabinet, badan legislative, dan pengadilan.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, tetapi dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada Presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.

Dalam hukum konstitusi Mesir, presiden didukung oleh minimal dua per tiga anggota legilatif kemudian ahrus mendapatkan persetujuan mayoritas para pemilih. Presiden memiliki masa bakti yang tidak terbatas, sehingga Presiden berkuasa bebas sampai kapanpun. Satu masa bakti atau periode kepemimpinan Presiden adalah

enam tahun. Presiden bebas mengangkat seorang Wakil Presiden ataupun Perdana Menteri serta anggota cabinet, selain itu Presiden juga luluasa dapat memberhentikan mereka. Tugas anggota cabinet adalah membantu Presiden dalam merencanakan dan mengarahkan kebijakan.

Untuk badan legislative, Mesir memiliki sebuah lembaga yang bernama Majelis Rakyat atau *Majlis Al-Sya'ab* yang separuh anggotanya haruslah seorang pekerja atau petani. Masa bakti dalam satu periode adalah lima tahun. Pemilih dapat memilih 448 anggota, sedangkan presiden mengangkat 10 anggota Majelis Rakyat yang boleh ikut serta dalam pemilihan umum adalah warga Negara Mesir yang berusia 18 tahun keatas.

Berhubung sistem pemerintahan Mesir adalah republik, tentunya terdapat partai politik di dalamnya. Salah satu partai besar di Mesir yaitu Partai Demokrasi Rakyat yang mencakup berbagai kalangan masyarakat. Kemudian Partai Demokrasi Nasional bentukan Husni Mubarak, dan Partai Kebebasan dan Keadilan bentukan Ikhwanul Muslimin.

C. Mesir Pada Masa Rezim Husni Mubarak

Husni Sayyid Mubarak lahir pada 4 Mei 1928 di Kafr-El Meselha Mesir. Beliau memulai karier dengan mengikuti Akademi Militer dan lulus dengan gelar sarjana yang di berikan pada tahun 1949. Pada tahun 1950, beliau bergabung dengan Akademi Angkatan udara dan kembali meraih gelar sarjana Ilmu Penerbangan serta sempat mengajar di Akademi Angkatan Udara pada periode 1952-1959. Pada tahun 1964, beliau diangkat sebagai Kepala Delegasi Militer Mesir untuk USSR. (Biography.com, 2014)

Pada tahun 1973 Husni Mubarak mencapai puncak kariernya. Mubarak dipercaya untuk menjadi komandan angkatan udara karena dinilai sukses dalam menginstruksikan serangan udara awal yang menentukan

dalam perang tersebut. Disamping itu, selain menjadi komandan angkatan udara, Mubarak dipromosikan menjadi Deputy Menteri Pertahanan karena prestasi yang dia capai. Sampai pada akhirnya tahun 1975 Anwar Sadat menunjuk Mubarak untuk mendampingi sebagai Wakil Presiden Mesir.

Sosok kepemimpinan Husni Mubarak begitu melekat pada jati diri masyarakat Mesir, sejak 14 Oktober 1981 ia menjadi Presiden Mesir yang menggantikan kepemimpinan Anwar Sadat yang tewas tertembak dalam sebuah acara parade militer di Kairo. Pada awal kepemimpinannya, Mubarak menjalankan politik Mesir sesuai dengan program kepemimpinan sebelumnya, beliau menekankan pada perbaikan keadaan ekonomi Mesir yang lambat pertumbuhannya. Husni Mubarak dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan otoriter, di samping dengan sifatnya yang kontroversial. Selama pada masa kepemimpinannya, sering kali terjadi demonstrasi yang menentang terhadap pemerintahan yang selalu membatasi segala aspirasi dan ekspresi rakyat untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah. Bahkan seringkali dilawan oleh aparat dengan sikap intimidasi agar para demonstran diam dan tidak menentang segala bentuk kebijakan yang di buat oleh Husni Mubarak. Sikap otoriter Mubarak pun juga tidak hanya membatasi terhadap rakyatnya saja, melainkan juga di tujukan terhadap media massa yang tidak sejalan dengan Husni Mubarak. Presiden yang hampir berkuasa selama 30 tahun ini pun berhasil membuat demokrasi yang semu, yang mana pemilihan presiden hanya diisi satu kandidat tunggal. Keberadaan partai oposisi pun selalu di awasi oleh kekuatan partai pemerintah.

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, Presiden Mubarak menghadapi masalah serius dalam menangani kondisi negaranya, seperti tingginya angka pengangguran, pertumbuhan penduduk yang susah untuk di kendalikan dan tingginya harga bahan pokok. (Abdurahman, 2014)

Korupsi, kolusi dan nepotisme semakin merebak dan tidak terbandung, serta ancaman kaum ekstrimis semakin banyak bermunculan akibat dampak kekecewaan terhadap pemerintah dengan membentuk kelompok aksi sebagai bentuk perlawanan.

Pada masa Mubarak, militer mempunyai kedudukan khusus dalam pemerintahan. Kekuatan militer Mesir selalu kokoh keberadaannya dalam politik domestik semenjak Raja Farouk dijatuhkan oleh Gamal Abdul Nasser dibawah perintah dari Jendral Muhammad Naguib untuk mengusir penguasaan Inggris di Mesir. (Fowler, 1984) Kekuasaan Mesir pun dilanjutkan oleh Muhammad Naguib yang tidak lama masa kepemimpinannya karena digeser oleh Gamal Abdul Nasser yang maju di kursi Kepresidenan. Selain Gamal Abdul Nasser, kursi kepresidenan Mesir juga diduduki oleh tokoh-tokoh militer lainnya yaitu Anwar Saddat dan Husni Mubarak. Partai Nasional Demokrat menjadi partai yang berkuasa sejak Mubarak memimpin. Hal itu tidak lepas dari peran militer yang selalu mendukung kebijakan Mubarak. Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces – SCAF*) didirikan dan memiliki keistimewaan dalam kancah politik Mesir.

Mesir tergolong Negara Arab yang berperan penting sebagai aktor politik yang berpengaruh terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah umumnya, khususnya berkaitan dengan usaha penyelesaian sengketa Arab-Israel yang berintikan masalah Palestina. Peran aktif Mesir diamati dalam beberapa lingkaran yang secara konsentris berurutan yaitu Liga Arab, Organisasi Konfrensi Islam, Organisasi Persatuan Afrika, dan Gerakan Non Blok. Mesir termasuk salah satu pemrakarsa bagi lahirnya organisasi tersebut dan selanjutnya memainkan peran aktif dalam berbagai urusan yang melibatkan kepentingan negara-negara anggota. Keterlibatan secara langsung dalam sengketa Arab-Israel membawa Mesir berperan sebagai aktor politik penting

dalam lingkaran Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini.

Sejarah politik luar negeri Mesir sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri negara tersebut dibawah kepemimpinan Mubarak. Husni Mubarak terkenal sebagai pendukung penuh kebijakan politik Anwar Sadat, termasuk politik luar negeri khususnya upaya Sadat untuk mengakhiri masa “*no recognition, no negotiation, no peace*” yang ditandai dengan Perjanjian Damai Camp David oleh Mesir, Amerika Serikat, dan Israel. Disamping itu, Sadat perlahan mulai mengalihkan kerjasamanya dengan Uni Soviet dan lebih mengintensifkan hubungan kerjasama bersama Amerika Serikat melalui kebijakan liberalisasi ekonomi dan bantuan pertahanan keamanan, meskipun mendapat penentangan dari rakyat Mesir. Seperti yang diketahui, pada saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat merupakan aktor penting dalam konstelasi konflik di Timur Tengah dimana Uni Soviet secara menyeluruh mendukung negara-negara Arab, sementara Amerika Serikat akan melakukan apapun bahkan bantuan dan gerakan militer untuk menjaga eksistensi Israel di kawasan tersebut.

Pengalihan arah politik luar negeri masa Anwar Sadat membawa dampak bagi pemerintahan Mubarak terutama dalam lingkup dunia Arab. Mesir dikeluarkan dalam keanggotaan Liga Arab, dan Kantor Pusat Liga Arab yang semulanya bertempat di Kairo dipindahkan ke Tunisia, Tunisia. Berbagai sumber bantuan dari negara-negara Arab dihentikan dan praktis terkucil dari dunia Arab, karena tertuduh melakukan perjanjian perdamaian tersendiri (*separate peace*) yang bertentangan dengan kesepakatan antar-Arab untuk hanya menerima penyelesaian perdamaian yang menyeluruh (*comprehensive peace*). Selain itu, Mesir tidak banyak mendapat dukungan seperti biasanya dan cenderung dikucilkan dari forum OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan GNB (Gerakan Non-Blok). Kondisi ini semakin kuat

setelah diadakannya pertemuan puncak negara Arab di Baghdad yang mengeluarkan pernyataan “mengutuk perjanjian Camp David” dan menghasilkan sanksi terhadap Mesir berupa isolasi politik dan pembekuan sumber bantuan keuangan yang sedianya diterima dari beberapa negara petro-dollar Arab.

D. Arab Spring

Arab Spring merupakan suatu kebangkitan dunia Arab yang lahir di Timur Tengah, sebuah daerah yang kaya minyak, sekaligus menjadi pemasok minyak terbesar dunia. Arab Spring jika diartikan secara literal, bermakna pemberontakan Arab atau Pemberontakan yang dimulai dari Tunisia pada musim semi, Desember 2010. (Agastya, Arab Spring, 2013, p. 12)

Pada saat itu Masyarakat menuntut mundurnya presiden Tunisia yang menjabat melalui kudeta yaitu Zine El Abidin Ben Ali dan Ben Ali diturunkan secara paksa oleh rakyat Tunisia. Fenomena ini menjadi “inspirasi” bagi masyarakat Mesir, yang dipimpin oleh presiden Husni Mubarak selama hampir 30 tahun lamanya untuk melakukan penurunan paksa terhadap kekuasaan diktator Mubarak pada tanggal 25 Oktober 2011, revolusi ini terjadi selama 18 hari penuh dengan kekerasan dan konflik antara rakyat dengan pasukan pemerintahan Mubarak.

Sejak itu, Arab Spring telah terjadi di Tunisia dan Mesir, Pemberontakan Sipil di Bahrain dan Suriah, Perang Saudara di Libya, Protes-protes kecil di Kuwait, dsb. Ada pandangan lain yang mengatakan Arab Spring ialah gelombang Revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sebuah Revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan diktator yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah.

Berdasarkan beberapa definisi Arab Spring tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Arab Spring ialah suatu bentuk protes massa (revolusi) yang bertujuan untuk menggulingkan, menurunkan, melengserkan serta

mengukudeta para pemimpin negara karena telah bertindak dictator, otoriter, korup, dan menindas rakyat dalam memimpin. Dalam Bahasa sederhananya rakyat (massa) turun ke jalan melakukan demonstrasi dan protes terhadap pemerintah, sekaligus menuntut presiden turun dari jabatannya. Itulah revolusi yang sedang terjadi di dunia arab.

Dalam Arab Spring atau revolusi negara-negara Timur Tengah tersebut, yang menjadi motor penggerakannya adalah para pemuda berpendidikan di masing-masing negara yang dilanda isu revolusi. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan otoriter sudah tidak tepat diterapkan di negara mereka. Mereka pun ingin mengubah system negara menjadi demokrasi. Dalam prosesnya, mereka menghimpun dukungan melalui berbagai media, terutama media sosial.

Munculnya revolusi di negara-negara timur tengah itu bukan tanpa dukungan pihak lain. Justru, banyak pendapat yang beranggapan bahwa revolusi Timur Tengah itu tak lepas dari campur tangan luar negeri (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara Timur Sosialis yang memiliki kepentingan terhadap Timur Tengah) dalam setiap aksi massa yang terjadi di negara yang sedang dilanda isu revolusi

Kejadian Arab Spring ini awalnya mengarah kepada perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah, dengan gugurnya para pemimpin Arab yang mengusung gaya diktator dalam mengelola kekuasaan, mulai menampakkan kilas balik yang menguntungkan Israel, yaitu rontoknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dinilai menjadi ganjalan kuat terhadap perkembangan Israel dalam menundukkan Palestina. Akibatnya, agar bisa berkembang, banyak dari negara tersebut harus memulai dari nol dalam menata kehidupan sosial yang telah banyak mengalami kemelut internal sekaligus mengelola ekonomi negara yang telah jatuh terpuruk, serta memulai lagi membina kekuatan militer yang porak-poranda oleh

keributan internal mereka. Namun yang menjadi pemicu paling menentukan justru situasi dan kondisi yang meliputi negara di Timur Tengah yang bersangkutan, terutama adanya kesenjangan sosial yang timpang Antara pemegang kekuasaan (pemerintah/rezim berkuasa) dengan masyarakat (rakyat).

1. Revolusi Melati di Mesir

Revolusi Melati adalah suatu istilah yang diberikan oleh orang-orang Timur Tengah untuk mengidentikkan pergolakan rakyat di Negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga Melati yang sedang mekar. Bunga melati adalah bunga tradisional dalam budaya Arab dan dalam budaya lainnya, diasosiasikan dengan wewangian yang menyenangkan, kecantikan, kelembutan, dan kehalusan. Melati merupakan symbol Tunisia yang berarti kemurnian, keindahan, dan toleransi. (Kucahyono, 2017) Negara-negara yang bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah tangkai yang berada satu di Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah. Satu per satu kuncup itu mulai mengeluarkan baunya yang harum yaitu peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi.

Timur Tengah merupakan area yang dalam konteks abad 20 ditengarai sebagai pusaran konflik dunia. (Surwandono, 2011) Bermunculan permasalahan antar suku dan ras yang berkecamuk di Timur Tengah membuat wilayah ini sarat akan krisis dan konflik. Resolusi konflik yang minim membawa pengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah yang rentan akan konflik, selain itu juga mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan internasional. Fenomena pergolakan politik ini membawa nasib setiap negara yang mengalaminya menuju suatu kondisi revolusi.

Pada penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan Timur Tengah

mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan revolusi *Arab Spring* atau dengan nama *Jasmine Revolution* (Revolusi Melati). Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara Arab lainnya. Dalam konteks *Arab Spring*, sesuatu yang bersemi adalah nilai-nilai demokrasi yang kemudian menyebar dengan efek domino ke negara-negara sekitarnya. Arab Spring di Timur Tengah ini bermula dari peristiwa seorang sarjana muda yang bekerja sebagai pedagang sayuran membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap pemerintah karena minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Tunisia semakin tinggi. Aksi bakar diri yang di lakukan pemuda tersebut menciptakan sebuah pergerakan rakyat Tunisia untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Ben Ali. Dalam prosesnya, mereka menghimpun dukungan melalui berbagai media, terutama media sosial Facebook dan Twitter. Berbagai aksi yang dilakukan oleh rakyat Tunisia secara langsung memicu terjadinya apa yang disebut sebagai revolusi.

Sejak peristiwa tersebut, terjadi aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Tunisia, aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Tunisia yang sudah bosan dan jenuh terhadap kondisi di negaranya, setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, kekuasaan Presiden, akhirnya lepas pada tanggal 14 february 2011. Kesuksesan masyarakat Tunisia meruntuhkan rezim pemerintahan Ben Ali mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama, mengingat rakyat Mesir memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta sifat kekuasaan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih. Faktor tersebut yang mendasari

dibentuknya sebuah gerakan *Revolusi Mesir* dalam rangka menjatuhkan rezim Mubarak.

Timbulnya pergolakan rakyat di semenanjung Timur Tengah dan Afrika Utara begitu cepat dan hanya “pemantik api” untuk menyalakan api dalam sekam yang sudah lama tersimpan dan siap membakar. Pada akhirnya terbukti, api tersebut betul-betul membakar rakyat di kawasan Timur Tengah untuk menumbangkan rezim penguasa mereka.

Mengacu pada hukum sebab-akibat, fenomena *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah ada bukan tanpa sebab. Rakyat yang melakukan revolusi memiliki alasan untuk menumbangkan penguasa mereka. Mencermati dan menganalisa gerakan revolusi rakyat tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan revolusi, yaitu sebagai berikut: (Tamburaka, 2011, p. 12)

Pertama, rakyat di kawasan Timur Tengah memiliki kultur budaya yang hampir sama, yaitu bangsa Arab dan didominasi oleh kaum Muslimin yang dulunya memiliki kejayaan di masa lampau. Sehingga meskipun terpisah-pisah dalam beberapa Negara dalam beberapa Negara, namun mereka merasa senasib dan sepenanggungan.

Kedua, mereka sama-sama merasakan pahitnya penjajahan kolonialisme selama beberapa dekade meskipun pewaris selanjutnya adalah kaum generasi muda. Namun, mereka juga merasakan penderitaan yang diwariskan pendahulu di masa lampau dan menyebabkan keterbelakangan mereka dalam segala hal. Tunisia dan Aljazair pernah dijajah Perancis, dan Mesir pernah dijajah Inggris.

Ketiga, pasca-kemerdekaan dari kolonialisme mereka belum mengecap kemerdekaan dalam arti sebenarnya, baik ekonomi dan politik termasuk merasakan “manisnya” arti sebuah demokrasi. Justru para penguasa menjadi diktator dan otoritarian.

Kondisi kemiskinan, pengangguran yang dirasakan sejak zaman kolonialisme hingga sekarang masih dialami. Padahal kawasan Timur Tengah memiliki sumber daya alam minyak, sementara Negara-negara di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke-20. Rata-rata pendapatan perkapita rakyat di kawasan Timur Tengah hanya sebesar US\$ 2 per hari. Kekayaan alam memang dikelola Negara, namun dikuasai oleh segelintir orang yang dekat dengan penguasa, termasuk aset-aset Negara yang berupa perusahaan dan badan usaha. Sehingga kekayaan itu hanya menumpuk pada penguasa dan orang-orang yang dekat dengannya.

2. Revolusi Mesir 2011

Revolusi Mesir 2011 yang merupakan imbas dari Arab Spring tak lepas dari bangkitnya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah kelompok bentukan Hasan Al-Banna pada tahun 1928. Misi Ikhwanul Muslimin adalah mendidik rakyat, meningkatkan taraf hidup mereka, dan menyebarkan pesan “pranata islam” (*al-nizham al-islam*).

Ikhwanul Muslimin menegaskan kembali visi misi islam komprehensif. Terkait itu, Hasan Al-Banna Berucap “islam adalah iman dan ritual, Negara dan kebangsaan, agama dan Negara, spiritualis dan amal, serta Al-Qur’an dan pedang” (Agastya, 2013).

Peristiwa terbunuhnya Anwar Sadat, Mubarak yang menjadi pengganti pada saat itu dikenal sebagai sosok yang moderat dan menekankan liberalisasi dan toleransi politik. (Esposito, 2007) dan kebijakan yang diambil Mubarak tersebut dimanfaatkan anggota Ikhwanul Muslimin yang sempat terbungkam untuk unjuk gigi kembali dan pada akhirnya Ikhwanul Muslimin menjadi sebuah kelompok organisasi yang memiliki kekuatan oposisi yang kuat yang banyak mendominasi di lembaga pemerintahan.

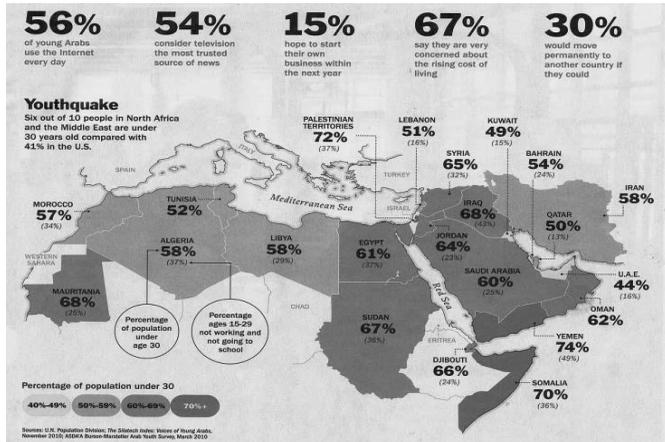
Dalam masa kepemimpinan Husni Mubarak sosial, ekonomi dan politik Mesir mengalami kemunduran, yang ditandai harga kebutuhan pokok semakin mahal, rendahnya upah pekerja, pengangguran dan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme selama Mubarak menjabat. Hal tersebut yang memicu terjadinya demonstrasi di berbagai daerah di Mesir yang menyuarakan slogan “cukup sudah kekuasaan Mubarak” yang dinilai cukup berhasil menarik perhatian pemerintah akan tetapi belum menjadi topik utama di Mesir akan tetapi gerakan tersebut menjadi benih revolusi.

Tidak pasti bagaimana awal revolusi itu muncul, akan tetapi pemicu tersebut diawali pada 6 Juni 2010. Seorang *blogger* yang bernama Khaled Saeed meninggal akibat disiksa oleh polisi. Dia di siksa secara brutal karena polisi mengetahui bahwa Khaled mengunggah video polisi Mesir yang sedang berbagi marijuana yang didapat dari hasil penyitaan lapangan. Hal tersebut tidak direspon positif oleh pemerintah tetapi menganggap bahwa Khaled adalah seorang penjahat yang melarikan diri dan pantas mendapat perlakuan seperti itu. Atas kejadian tersebut, seorang warga mesir yang bernama Wael Ghonim yang merupakan Kepala Marketing di Google berinisiatif untuk membuat sebuah grup di *Facebook* yang di beri nama “*We Are All Khaled Saeed*”. Karena dengan internet, kebenaran tersebar luas dan semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan semua orang akan mulai berfikir bahwa kejadian seperti ini bisa terjadi pada saudara dan kerabat dekatnya. (Ghonim, 2011)

Aksi gigih dan pengorbanan Ghonim di dalam pergerakannya membangkitkan kesadaran banyak orang di Mesir. Tidak hanya kaum muda tapi juga kaum tua dan warga-warga yang sudah mapan seperti Afan Naged, mantan anggota Komisaris Bank Nasional Mesir semua ikut serta melakukan

pergerakan baik dari aksi langsung di lapangan maupun membuat sebuah aliansi dengan membentuk grup di media sosial untuk menyuarakan pergerakan dan menarik perhatian dari orang-orang di seluruh dunia.

Dalam sebuah survei, ditemukan bahwa 56% pemuda Timur Tengah menggunakan internet setiap hari, 54% menonton acara berita terpercaya di televisi, 15% sangat menyadari tingginya biaya hidup yang mereka hadapi, dan 30% menginginkan untuk pindah secara permanen ke negara lain apabila memungkinkan (Ghosh, 2011). Peta survei tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta persebaran pemuda dan aktivitas penggunaan teknologi di Timur Tengah

Kelompok *facebook* mendapatkan dukungan yang sangat luas dan turut memobilisasi rakyat Mesir untuk turun kejalan menuntut mundur Husni Mubarak.

Kemudian pemicu yang selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Januari 2011 seorang pria bakar diri di di luar gedung parlemen Kairo ibukota Mesir. (BBC, p. 2011) Tidak hanya itu, hari selanjutnya pada tanggal

18 Januari dua orang bakar diri di Kairo. Tindakan tersebut merupakan bentuk aksi yang serupa yang sebelumnya terjadi di Tunisia saat masyarakat mengudeta Ben Ali. Kejadian tersebut tidak terjadi aksi protes yang besar, akan tetapi kejadian tersebut membukakan mata masyarakat untuk melihat apa yang sedang terjadi di Mesir.

Berikut merupakan kronologi awal mula terjadinya revolusi seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kronologi Revolusi Mesir 2011

No	Waktu	Peristiwa
1.	14/01/2011	Presiden Tunisia melarikan diri ke Arab yang menewaskan puluhan orang akibat bentrokan aparat dan demonstran.
2.	25/01/2011	Terinspirasi dari kejatuhan presiden Tunisia, peristiwa “Hari Kemarahan” pun dimulai.
3.	26/01/2011	Hari kedua dari protes.
4.	27/01/2011	Mesir tutup internet.
5.	28/01/2011	Mubarak berbicara, akan membentuk pemerintahan baru.
6.	29/01/2011	Pengguna internet Mesir berkomunikasi.
7.	30/01/2011	Hillary Clinton: Mesir perlu transisi untuk demokrasi.
8.	31/01/2011	Pemerintah baru Mesir diumumkan.
9.	01/02/2011	Presiden Mubarak berjanji tidak akan ikut pemilu.
10.	02/02/2011	Mengembalikan layanan internet di Mesir.
11.	03/02/2011	Wartawan asing ditangkap.
12.	04/02/2011	Protes “Hari Keberangkatan” Mesir.
13.	05/02/2011	Anggota dari partai mengundurkan diri.
14.	06/02/2011	Pemerintah sepakati konsesi.
15.	07/02/2011	Eksekutif Google di Mesir.
16.	08/02/2011	Aktivis memberi semangat.
17.	09/02/2011	Pemogokan tenaga kerja sepanjang Mesir.
18.	10/02/2011	Meskipun rumor, Mubarak tolak untuk langkah turun
19.	11/02/2011	Mubarak mengundurkan diri sebagai presiden.

Sumber: Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah*, hal 76-77.

Estafet pemerintahan mulai menunjukkan aroma pergantian. Tepat pada 11 Februari 2011 rezim Hosni Mubarak berhasil ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri karena kediktatorannya. Salah seorang demonstran, Essam Abdul Qader mengatakan bahwa masyarakat sudah muak melihat pola kepemimpinan politik di Mesir (republika.co.id: 1 Februari 2011).

Kemarahan masyarakat Mesir hingga ke permukaan juga tidak dapat dibendung oleh kekuatan militer dan aparat kepolisian. Semua elemen masyarakat bersatu untuk perubahan sistem pemerintahan Mesir yang lebih baik. Elemen tersebut bukan hanya berasal dari satu kelompok (Islam), tetapi terdiri dari kubu Muslim, Kristen, dan sekuler Mesir. Para pemimpin di Eropa mengindikasikan bahwa Islam adalah dibalik kekacauan pemerintahan Mubarak. Tetapi, wartawan Al Jazeera Ayman, Mohyeldin, menyebutkan bahwa sinyal elemen gerakan massa hanya dimotori kubu Islamis adalah salah besar. Demo melibatkan semua masyarakat yang marah dengan Mubarak. Kaum Muslim, Kristen, dan sekuler bergandengan tangan di Tahrir Square. (republika.co.id: 2 Februari 2011)

Kemarahan rakyat Mesir atas kebobrokan pemerintahan Hosni Mubarak menciptakan suasana perlawanan rakyatnya sendiri dari segala arah. Terjadinya ledakan perlawanan tersebut, tentu menimbulkan luka yang pilu bagi setiap individu. Tetapi atas rasa nasionalisme yang tinggi, perubahan menuju Mesir yang lebih baik akan selalu ditempuh oleh seluruh rakyat apapun resikonya. Hal ini sudah terbukti dengan peristiwa pelengseran Mubarak dengan demonstrasi dan cara-cara melalui sosial media dari seluruh elemen masyarakat.

Itulah kronologis berlangsungnya revolusi Mesir 2011. Pernyataan memundurkan diri ini disiarkan melalui media lokal di Mesir salah satunya televisi.

Pengumuman yang disampaikan tersebut disambut dengan meriah oleh massa yang berdemonstrasi di wilayah Tahrir Square, Kairo. Mereka merayakan jatuhnya rezim dan mengibarkan bendera Mesir sebagai tanda awal harapan baru.



Gambar 2 3 Pengunduran diri Presiden Husni Mubarak
Sumber : (CNN, 2012)

Tokoh oposisi Mesir yaitu Muhammad El-Baradei menyebutkan bahwa kemunduran Mubarak yang telah memimpin Mesir selama 30 tahun merupakan hari yang sangat berarti bagi semuanya, karena setelah penindasan yang dilalui rakyat Mesir, akhirnya bebas dari ancaman.

E. Mesir Pasca Runtuhnya Rezim Husni Mubarak

Setelah penggulingan Husni Mubarak, pemerintah transisi dikendalikan oleh *Council of The Armed Forces* (SCAF). Berbagai kebijakan telah di buat agar pemilihan presiden yang baru Mesir memulai transisi demokrasi dengan di laksanakannya pemilu pertama kali yang dipilih secara demokratis.

Hasil pemilihan umum ini akhirnya di menangkan oleh Muhammad Mursi. Komisi Pemilihan Umum Mesir menyatakan Mursi meraih 51,73% suara, mengalahkan

mantan perdana menteri Ahmed Shafiq, Mursi meraih 13.230.131 suara sementara Shafiq mendapat 12.347.380 dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 51,8% dari lebih 50 juta warga Mesir yang memiliki hak untuk memberikan suara. (BBC, 2012)

Tabel 2 2 Hasil Pemilu Parlemen 2011

NO	PARTAI	JUMLAH KURSI PARLEMEN
1	Democratic Alliance for Egypt	235
2	Blok Islamis	123
3	New Wafd Party	41
4	Egyptian Bloc	35
5	Al-Wasat Party	10
6	The Revolution Continues Alliance	9
7	Reform and Development Party	9
8	Freedom Party	5
9	National Party of Egypt	5
10	Egyptian Citizen Party	4
11	Union Party	2
12	Conservative Party	1
13	Democratic Peace Party	1
14	Justice Party	1
15	Arab Egyptian Unity Party	1
16	Nasserist Party	1
17	Calon Independen	21
18	Calon Pilihan	10

Keterangan : (1) Democratic Alliance For Egypt terdiri dari Ketua Aliansi Freedom and Justice Party, dan anggota-anggotanya seperti Dignity Party, Ghad El-Thawara Party, Civilization Party, Islamic Labour Party, Egyptian Reform Party, dan Afiliasi Independen. (2) Blok

Islam terdiri dari Al-Nour Party, Building and Development Party, New Wafd Party, dan Authentic Party. (3) Egyptian Bloc terdiri dari Saine Democratic Party, Free Egyptianis Party, dan progressive Unionist Party. (4) The revolution Continues Alliance terdiri dari Socialist Popular Alliance Party, Freedom Egypt Party Equality, dan Development Party.

Dengan hasil tersebut maka partai-partai Islam menguasai sekitar dua pertiga parlemen. Mohammed Mursi merupakan calon presiden dari Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party*), yang merupakan partai bentukan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang dilarang di bawah pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Kemenangan mutlak ini membuat FJP sudah memutuskan seorang politisi seniornya, Saad al- Katatni, untuk ditunjuk sebagai ketua Majelis Rakyat.